

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berisi gambaran singkat setting penelitian, hasil uji angket penelitian, analisis deskripsi akuntabilitas, deskripsi transparansi keuangan, transparansi kinerja pemerintah daerah, hasil uji asumsi, dan hasil analisis regresi.

5.1.1 Gambaran Umum Setting Penelitian

Bapenda merupakan instansi di bawah pemerintah daerah yang memiliki fungsi serta tugas dalam mengelola pendapatan masing-masing daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundangan daerah atau Perda. Bapenda bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah. Tugas Bapenda mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengordinasi instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah mendukung peran dan rasionalitas pengawasan pemerintah pusat dalam evaluasi raperda dan perda PDRB serta sinergitas data dan informasi PDRD. Kajian proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB-PBBKB-PAP) Provinsi Kalimantan Selatan t⁶⁶ 2024-2028 ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; menganalisis aspek pengembangan organisasi dalam tataran:

1. aspek sumber daya strategik pajak dan retribusi daerah,
2. aspek struktur organisasi serta administratif pajak dan retribusi daerah,
3. aspek komunikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dan
4. aspek disposisi atau sikap para pelaksana dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; serta menganalisis realisasi dan potensi prakiraan penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam PKB, BBNKB I- BBNKB II, PBBKB dan PAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pembangunan, dalam tahun 2023 berupaya untuk melanjutkan

upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Melalui upaya menetapkan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah tahun 2023-2028. Melalui diskresi dalam manajemen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan pajak air permukaan (PAP). Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (PKB-BBNKB-PPBKB-PAP) merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu upaya penguatan keuangan daerah ke dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ditetapkan pada 16 Juni 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mencabut Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Fungsi Dispenda atau Bapenda secara khusus diatur oleh masing-masing daerah. Namun fungsi Bapenda secara umum di antaranya:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalan dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.

9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor.

Jenis-jenis pajak Bapenda atau pajak yang dikelola oleh Dispenda sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (diubah/dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2022). Jenis pajak provinsi yang dikelola Bapenda

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

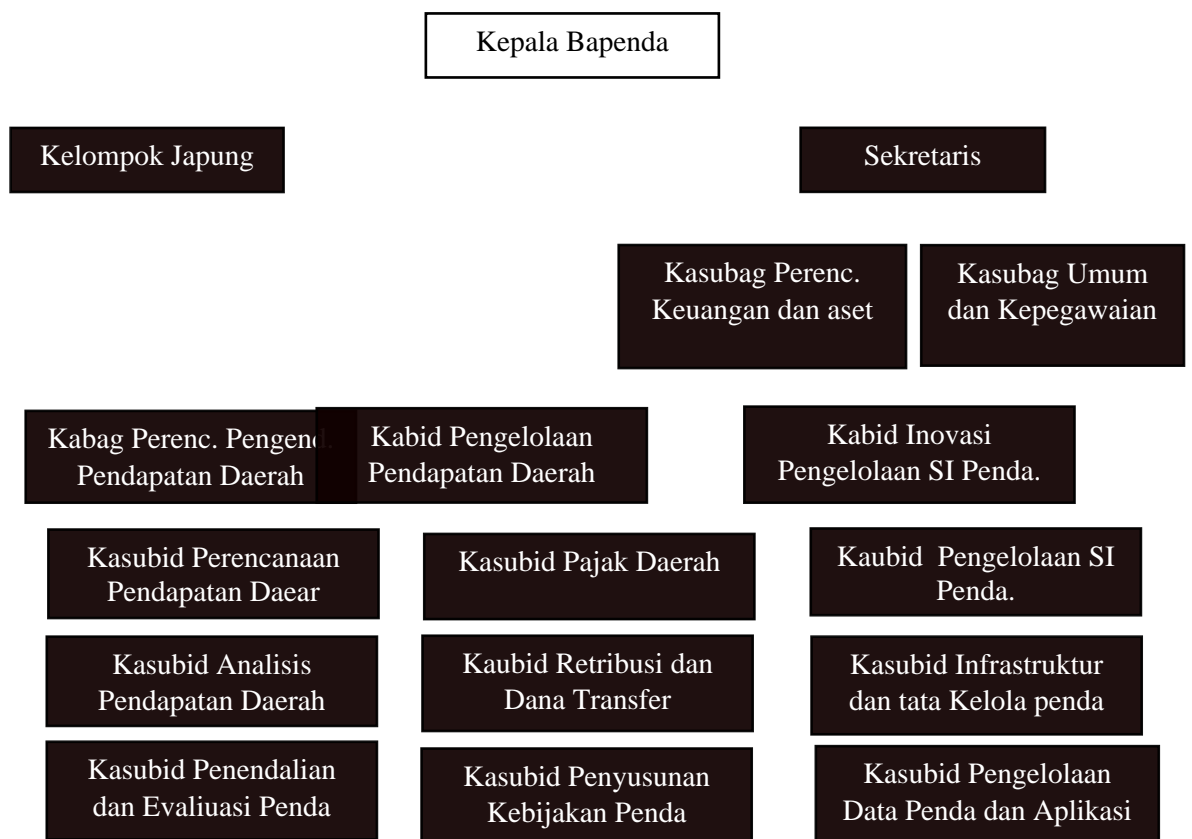
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok dipungut pemerintah.



5.1.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas Angket

Uji validitas angket penelitian ini berpedoman pada kriteria perbandingan r hitung $>$ r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka item angket valid. Jika r hitung $<$ r tabel, item angket tidak valid. Hasil uji validitas angket penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1) Angket Akuntabilitas

Tabel 5.1 Validitas Angket Akuntabilitas

No.	Item	r hitung	r tabel dengan jumlah n=25	Perbandingan	Keterangan
1.	X1.1.	0,731	0,396	0,731 > 0,396	Valid
2.	X1.2.	0,597	0,396	0,597 > 0,396	Valid
3.	X1.3.	0,855	0,396	0,855 > 0,396	Valid
4.	X1.4.	0,697	0,396	0,697 > 0,396	Valid
5.	X1.5.	0,565	0,396	0,565 > 0,396	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket akuntabilitas dalam penelitian ini terlihat bahwa nilai r hitung item 1 sampai 5 $>$ r tabel 0,396 pada jumlah responden ($n=25$). Semua item angket penelitian ini valid dan dapat digunakan mengumpulkan data akuntabilitas karena sesuai kriteria kriteria perbandingan r hitung $>$ r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka item angket valid. Jika r hitung $<$ r tabel, item angket tidak valid.

2) Angket Transparansi Keuangan

Tabel 5.2 Validitas Angket Transparansi Keuangan

No.	Item	r hitung	r tabel dengan jumlah n=25	Perbandingan	Keterangan
1.	X2.1.	0,602	0,396	0,602 > 0,396	Valid
2.	X2.2.	0,451	0,396	0,451 > 0,396	Valid
3.	X2.3.	0,695	0,396	0,695 > 0,396	Valid
4.	X2.4.	0,596	0,396	0,596 > 0,396	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket transparansi keuangan penelitian ini terlihat bahwa r hitung item 1 sampai 4 $>$ r tabel 0,396 pada jumlah responden ($n=25$). Semua item pada angket transparansi keuangan penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data transparansi keuangan karena memenuhi kriteria perbandingan r hitung $>$ r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka item angket valid. Jika r hitung $<$ r tabel, item angket tidak valid.

3) Angket Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 5.3 Validitas Angket Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Item	r hitung	r tabel dengan jumlah $n=25$	Perbandingan	Keterangan
1.	Y1	0,650	0,396	$0,650 > 0,396$	Valid
2.	Y2	0,688	0,396	$0,688 > 0,396$	Valid
3.	Y3	0,516	0,396	$0,516 > 0,396$	Valid
4.	Y4	0,543	0,396	$0,543 > 0,396$	Valid
5.	Y5	0,718	0,396	$0,718 > 0,396$	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji validitas angket kinerja pemerintah daerah khususnya Bapenda provinsi Kalimantan Selatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa r hitung item 1 sampai 5 $>$ r tabel 0,396 pada jumlah responden ($n=25$). Semua item pada angket kinerja pemerintah penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data kinerja pemerintah daerah karena memenuhi kriteria perbandingan r hitung $>$ r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka item angket valid. Jika r hitung $<$ r tabel, item angket tidak valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas angket ditentukan nilai Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$ angket penelitian reliabel dan dapat digunakan mengumpulkan data penelitian.

Tabel 5.4

Hasil Uji Reliabilitas Angket

No.	Angket Penelitian	Cronbach's Alpha	Perbandingan	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,855	$>0,6$	Reliabel
2.	Transparansi Keuangan	0,760	$>0,6$	Reliabel
3.	Kinerja Pemerintah	0,815	$>0,6$	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Hasil uji reliabilitas angket penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's Alpha semua angket $>0,6$. Nilai Cronbach's Alpha angket akuntabilitas $0,760 > 0,6$. Nilai Cronbach's Alpha angket transparansi keuangan $0,855 > 0,6$. Nilai Cronbach's Alpha angket kinerja pemerintah daerah $0,815 > 0,6$. Semua angket penelitian ini reliabel.

5.1.3 Hasil Analisis Deskripsi

Hasil jawaban responden pada angket penelitian ini memberikan Gambaran tentang akuntabilitas, transparansi keuangan, dan kinerja pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini diuraikan akuntabilitas, transparansi keuangan, dan kinerja pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan.

1. Akuntabilitas

Tabel 5.5 Deskripsi Akuntabilitas

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pemberian sanksi kepada yang melukan pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme	-	-	-	-	15	42,9	3	8,6	17	48,6
2.	Bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
3.	Penyusunan program sesuai aturan yang berlaku	-	-	-	-	6	17,1	10	28,6	19	54,3
4.	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan di tempat kerja	-	-	-	-	1	2,9	15	42,9	19	54,3
5.	Pembuatan laporan sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	1	2,9	11	31,4	23	65,6

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Keterangan:

STS= Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-ragu

S = Sangat Setuju

SS = Sangat Setuju

Tabel hasil analisis deskripsi akuntabilitas di atas menunjukkan tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju pemberian sanksi dikenakan kepada yang melukan pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme di

Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 15 orang (24,9%) Responden menjawab setuju 3 orang (8,6%). Responden menjawab sangat setuju pemberian sanksi dikenakan kepada yang melukan pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan 17 orang (48,6%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pegawai bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan tugas yang diberikan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab netral atau ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju pegawai bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan tugas yang diberikan di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju penyusunan program sesuai aturan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan jelas. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 6 orang (17,1%) Responden menjawab setuju 10 orang (28,6%). Responden menjawab sangat setuju Penyusunan program sesuai aturan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan jelas 19 orang (54,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan terarah. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang

(2,9%) Responden menjawab setuju 14 orang (40%). Responden menjawab sangat setuju anggaran disusun di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan terarah 20 orang (57,1%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pegawai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan di tempat kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tujuan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 19 orang (42,9%). Responden menjawab sangat setuju pegawai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan di tempat kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tujuan 19 orang (54,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pembuatan laporan sesuai ketentuan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan memungkinkan untuk dicapai (relistis). Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 11 orang (31,4%). Responden menjawab sangat setuju pembuatan laporan sesuai ketentuan yang berlaku di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan memungkinkan untuk dicapai (relistis) 23 orang (65,6%).

2. Transparansi Keuangan

Tabel 5.6 Deskripsi Transparansi Keuangan

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Penyampaian yang lengkap informasi	-	-	-	-	-	-	10	28,6	25	71,4

	program dan anggaran kepada publik										
2.	Informasi program dan anggaran mudah diakses publik	-	-	-	-	5	14,3	15	42,9	15	42,9
3.	Program dan anggaran sampaikan secara terbuka kepada publik sesuai dengan SOP	-	-	-	-	1	2,9	17	48,6	17	48,6
4.	Laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran disampaikan sesuai SOP	-	-	-	-	4	11,4	7	20	24	68,6

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel deskripsi transparansi keuangan, diketahui tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju penyampaian yang lengkap informasi program dan anggaran kepada publik. Responden tidak ada menjawab. Responden tidak ada menjawab netral atau ragu-ragu. Responden menjawab setuju 10 orang (28,6%). Responden menjawab sangat setuju penyampaian yang lengkap informasi program dan anggaran kepada publik 25 orang (71,4%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju informasi program dan anggaran mudah diakses publik. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 5 orang (14,3%). Responden menjawab setuju 15 orang (42,9%). Responden menjawab sangat setuju Informasi program dan anggaran mudah diakses publik 15 orang (42,9%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju program dan anggaran sampaikan secara terbuka kepada publik sesuai dengan SOP. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 1 orang (2,9%) Responden menjawab setuju 17 orang (48,6%). Responden menjawab sangat setuju program dan anggaran sampaikan secara terbuka kepada publik sesuai dengan SOP 17 orang (48,6%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran disampaikan sesuai SOP. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab netral atau ragu-ragu 4 orang (11,4%) Responden menjawab setuju 7 orang (20%). Responden menjawab sangat setuju laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran disampaikan sesuai SOP 24 orang (68,6%).

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 5.7 Deskripsi Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	SST		TS		R		S		SS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1.	Pengeluaran anggaran sesuai target yang telah ditetapkan	-	-	-	-	-	-	9	25,7	26	74,3
2.	Pembuatan anggaran terendah untuk program yang disusun	-	-	-	-	6	17,1	10	28,6	19	54,3
3.	Semua program tercapai dengan anggaran yang telah ditetapkan	-	-	-	-	2	5,7	16	45,7	17	48,6
4.	Semua program dapat dilaksanakan	-	-	-	-	1	2,9	12	34,3	22	62,9

	secara maksimal										
5.	Semua tujuan yang ditetapkan dalam semua program tercapai	-	-	-	-	3	8,6	12	34,3	20	57,1

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel deskripsi kinerja pemerintah daerah di atas, diketahui responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pengeluaran anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden tidak ada menjawab ragu-ragu. Responden menjawab setuju 9 orang (25,7%). Responden menjawab sangat setuju pengeluaran anggaran sesuai target yang telah ditetapkan 26 orang (74,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju pembuatan anggaran terendah untuk program yang disusun. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 6 orang (17,1%). Responden menjawab setuju 10 orang (28,6%). Responden menjawab sangat setuju pembuatan anggaran terendah untuk program yang disusun 19 orang (54,3%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju semua program tercapai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 2 orang (5,7%). Responden menjawab setuju 16 orang (45,7%). Responden menjawab sangat setuju semua program tercapai dengan anggaran yang telah ditetapkan 17 orang (48,6%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju semua program dapat dilaksanakan secara maksimal. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 1 orang (2,9%). Responden menjawab setuju

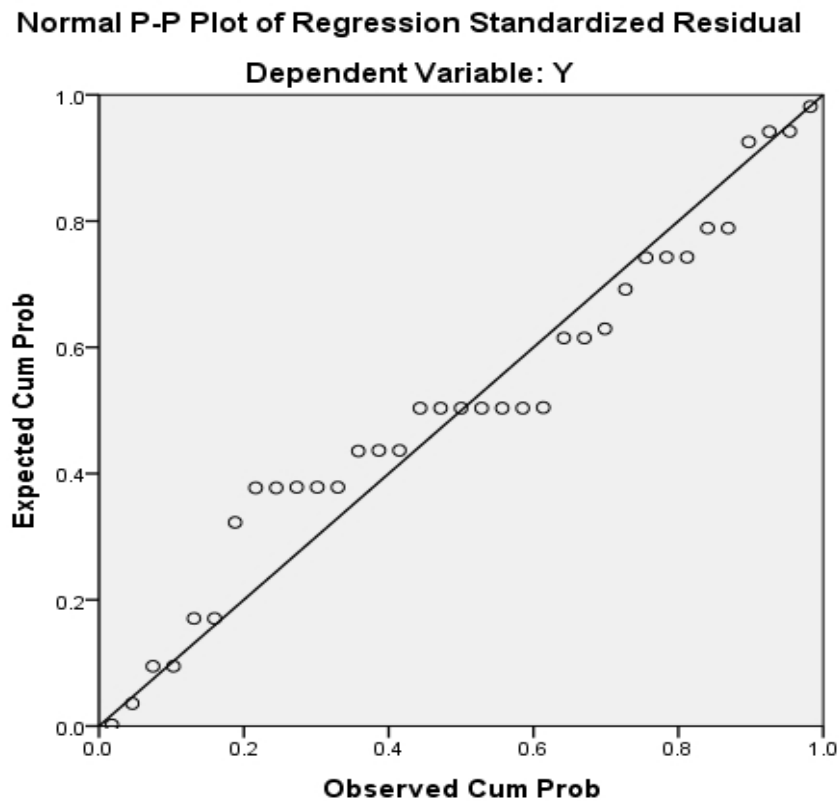
12 orang (34,3%). Responden menjawab sangat setuju semua program dapat dilaksanakan secara maksimal 22 orang (62,9%).

Responden tidak ada menjawab sangat tidak setuju semua tujuan yang ditetapkan dalam semua program tercapai. Responden tidak ada menjawab tidak setuju. Responden menjawab ragu-ragu 3 orang (8,6%). Responden menjawab setuju 12 orang (34,3%). Responden menjawab sangat setuju semua tujuan yang ditetapkan dalam semua program tercapai 20 orang (57,1%).

5. 1.4 Hasil Uji Asumsi

a. Uji Normalitas Data

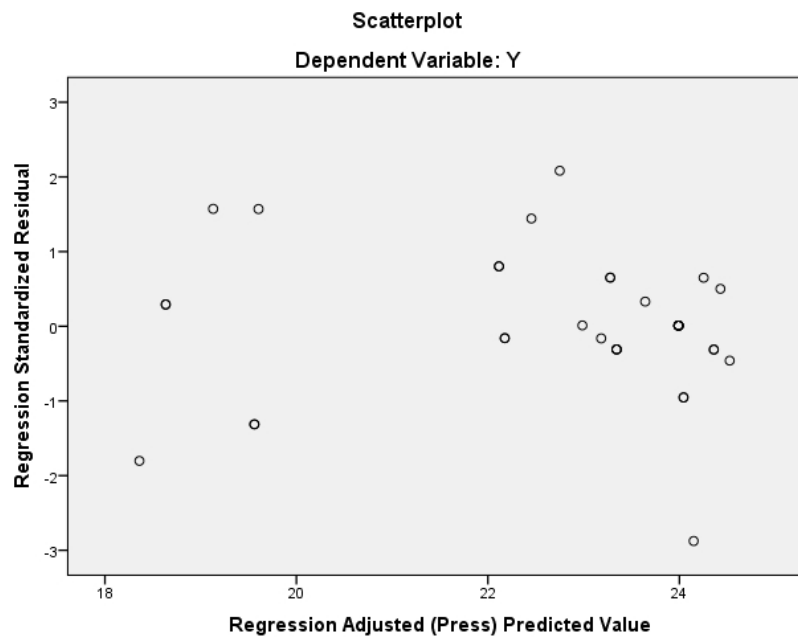
Normalitas data diuji dengan diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual* ini merupakan output analisis regresi. Ketentuannya adalah jika titik-titik pada diagram mengikuti garis lurus, maka data penelitian berdistribusi normal. Berikut ini diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual* hasil analisis regresi penelitian ini.



Hasil analisis regresi penelitian ini menunjukkan titik-titik mengikuti garis lurus pada diagram *P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Jadi data penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas ditentukan dengan menggunakan diagram pancar. Salah satu output analisis regresi dengan SPSS menunjukkan diagram pancar yang berfungsi untuk menentukan apakah data penelitian mengalami gejala heterokedastisitas. Jika pada diagram pancar itu terdapat titik-titik yang tersebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka data penelitian tidak mengalami gejala heterokedastisitas.



Berdasarkan hasil analisis regresi penelitian ini terdapat diagram pancar yang menunjukkan titik-titik tersebar dan tidak membentuk suatu pola. Dengan demikian data akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditentukan dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF. Ketentuannya adalah jika tolerance $>0,1$ dan $VIF < 10$, maka data penelitian tidak mengalami multikolinieritas. Hasil analisis regresi penelitian ini menunjukkan nilai tolerance dan VIF untuk semua variabel bebas.

Tabel 5.8 Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,433	2,309	Tidak terjadi multikolinieritas
2.	Transparansi keuangan	0,433	2,309	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Nilai *tolerance* akuntabilitas sebesar $0,236 > 0,1$ dan VIF $3,070 < 10$. Data akuntabilitas penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Nilai *tolerance* transparansi sebesar $0,3,26 > 0,1$ dan VIF $3,070 < 10$. Data transparansi keuangan penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Dengan demikian semua data penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

5.1.5 Hasil Analisis Regresi

Analisis regresi menunjukkan *output* tabel koefisien determinan, anova, dan koefisien regresi. Koefisien determinan dapat digunakan untuk menjelaskan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Anova digunakan untuk menentukan pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dan koefisien regresi menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 5.9 Koefisien Determinan

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,887 ^a	0,787	0,773	1,03984

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel koefisien determinan di atas dapat digunakan untuk memprediksi persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Nilai R pada tabel tersebut mencapai 0,887^a. Nilai R dikuadratkan (R square) mencapai 0,787. Ini dapat dimaknai bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 78,7%. Sisanya kinerja keuangan ini dipengaruhi variabel lain sebesar 21,3% (error)

Tabel 5.10 Koefisien Regresi

Model Penelitian	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,347	2,102		0,165	0,870
X1	0,334	0,137	0,303	2,444	0,020
X2	0,822	0,160	0,636	5,124	0,000

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Koefisien regresi atau uji t digunakan untuk memprediksi pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara parsial. Kriterianya adalah jika signifikansi $< 0,05$ maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial diterima. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial dalam penelitian ini diterima karena signifikansi yang dicapai $< 0,05$.

Hipotesis yang menyatakan Pengaruh akuntabilitas d terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan diterima karena nilai signifikansi hitung $0,020 < 0,05$. Hipotesis yang menyebutkan pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan diterima karena nilai signifikansi hitungnya $0,000 < 0,05$.

Tabel 5.11 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	127.571	2	63,785	58,991	0,000 ^b
1 Residual	34.601	32	1,081		
Total	162.171	34			

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel *Analysis of variance* (Anova) output analisis regresi di atas dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas dan transparansi

keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah secara simultan. kriteria menentukan pengaruh itu dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel dan membandingkan signifikansi hitung dengan nilai signifikansi 0,05. Nilai F hitung $>$ F tabel dengan signifikansi $<$ 0,05 membuktikan hipotesis yang menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah simultan diterima.

Berdasarkan tabel anova di atas, diketahui bahwa F hitung 58,991 dan signifikansi 0,000. Nilai F tabel di df 2 dan df 32 pada tabel F dengan taraf kepercayaan 0,5% sebesar 3,32. Jadi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan secara simultan diterima karena F hitung $>$ F tabel dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hipotesis yang menyatakan akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan di terima.

5.2 Pembahasan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diberikan penjelasan dari masing-masing hasil analisis yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil analisis penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kusumastuti (2014:2) bahwa akuntabilitas adalah

bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka diperoleh temuan empirik di lapangan bahwa pengelolaan keuangan pada Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan sudah dipersepsikan baik atau dengan kata lain sudah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dapat dilihat untuk akuntabilitas hukum dan kejujuran rata-rata dipersepsikan bahwa dalam pengelolaan keuangan selalu ada jaminan hukum.

Hukum dan peraturan lainnya, selain itu memberlakukan sanksi kepada setiap pegawai yang menyalahgunakan jabatan, dan KKN. Hasil temuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah ada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal yang baik. Kemudian ditinjau dari akuntabilitas manajerial, hasil temuan bahwa setiap pegawai mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik dan setiap pegawai dalam bekerja memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasinya secara efisien efektif.

Penyusunan program kegiatan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan selama ini, begitu pula bahwa setiap pegawai dalam bekerja

mampu bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Said (2015:9) bahwa kebanyakan keputusan manajerial dibuat berdasarkan batasan yang dikenakan oleh teknologi, kelangkaan sumber daya, kewajiban kontrak dan batasan-batasan pemerintah. Untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan nilai, para manajer harus mempertimbangkan baik implikasi jangka pendek maupun jangka panjang serta bagaimana berbagai batasan eksternal tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Ditinjau dari akuntabilitas kebijakan dimana sebagian besar pegawai memberikan setuju bahwa setiap pegawai yang bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan, begitu pula bahwa setiap pegawai yang bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas penetapan tujuan kebijakan yang memperhatikan kepentingan organisasi.

Hasil temuan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung visi dan misinya yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan Berkualitas dan Bermanfaat. Ditinjau dari akuntabilitas finansial/keuangan, hasil temuan bahwa pegawai bagian keuangan mampu membuat laporan keuangan setahun sekali, begitu pula bahwa setiap

pegawai bagian keuangan dalam menggunakan dana publik sudah dialokasikan secara efisien dan efektif dan tidak ada pemborosan. Ini dapat dilihat bahwa anggaran daerah sudah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif karena pengelolaan keuangan daerah sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2017) dan Wiguna, dkk (2015) yang telah membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil analisis data di atas telah menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tanjung (2014:11) bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hasil penyebaran kuesioner maka dikatakan bahwa transparansi sudah dipersepsikan baik oleh responden, hal ini dapat dilihat dari indikator informatif bahwa informasi yang diberikan kepada publik dapat

meningkatkan transparansi anggaran, begitu pula dengan adanya kemudahan untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran. Ditinjau dari keterbukaan bahwa pengumuman tentang anggaran didapat dalam setiap waktu. Temuan ini dikukung oleh penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) dan Riswanto (2016) menemukan bahwa secara parsial transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.